

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korea Selatan dan Korea Utara merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang kompleks sejak keduanya terpisah pada tahun 1945. Perpisahan kedua Korea ini dimulai sejak awal kependudukan Jepang di Korea tahun 1904. Akibat dari kependudukan Jepang ini, banyak masyarakat Korea yang harus meninggalkan tanah airnya dan mengungsi ke luar negeri. Ada bermacam-macam alasan yang mendasari arus perpindahan dan pengungsian tersebut.

Perpindahan yang mereka lakukan adalah usaha untuk lari dan melepaskan diri dari penderitaan dan kemiskinan, harapan untuk dapat menjalin hubungan dagang dengan dunia luar, serta tekad untuk membangun kampung masyarakat Korea di luar negeri yang akan dapat digunakan sebagai tempat menyusun kekuatan pasukan kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Korea.¹ Saat itu pula, masyarakat Korea mulai berpencar, sebagian memilih untuk mengungsi di dekat wilayah Manchuria, sebagian di dekat wilayah timur Rusia (Uni Soviet Timur pada zaman dahulu), Jepang hingga ke wilayah Amerika Serikat dan Meksiko.

¹ Yang, Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press, 2003. hal:143

Persebaran inilah yang memunculkan perbedaan untuk membawa kemerdekaan Korea atas Jepang.

Masyarakat Korea yang bermukim di wilayah dekat Rusia mulai terpengaruh gerakan pembangunan model sosialis-marxis ala Soviet dibawah kepemimpinan Lenin setelah Revolusi Bolshevik dan ideologi sosialisme masuk ke Korea pada tahun 1920-an yang kemudian dijadikan ideologi alternatif untuk mengusir Jepang dari Korea. Sedangkan masyarakat Korea yang mengungsi di wilayah Amerika, memegang ide pembaruan ala barat dengan ideologi liberal. Semenanjung Korea pun menjadi terpecah menjadi dua ideologi yang bertentangan.

Kekalahan Jepang pada perang Dunia II membawa kegembiraan untuk masyarakat Korea. Dengan dukungan seluruh rakyat Korea di berbagai wilayah, Komite persiapan kemerdekaan Korea membentuk dewan perwakilan di Seoul dan pada tanggal 6 September 1945 mengumumkan pembentukan *Choson Inmin Konghwaguk* (Republik Rakyat Korea) dan menjadwalkan kegiatan pemilihan umum nasional dalam waktu dekat.² Tetapi, kemerdekaan Korea atas Jepang ini tidak bertahan lama karena Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merasa memiliki andil besar dalam mengalahkan Jepang pada Perang Dunia menguasai wilayah yang diakui masing-masing. Korea bagian utara dikuasai Uni Soviet dan Amerika Serikat menguasai wilayah selatan. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara perwalian kedua Korea atas kontrol PBB selama 5 tahun.

² Ibid hal:188

Sesungguhnya, kedua belah pihak Korea menginginkan kemerdekaan atas seluruh Korea, akan tetapi perbedaan ideologi menjadi penghalang bagi keduanya. Hingga akhirnya pada tahun 1950 terjadi Perang Korea yang dimulai dengan penyerangan militer secara mendadak dari Korea Utara ke Korea Selatan. Setelah kurang lebih 3 tahun melakukan perang saudara, pada tanggal 27 Juli 1953 kedua belah pihak melakukan gencatan senjata yang menandakan berakhirnya perang saudara, akan tetapi ketika perang saudara selesai bukan berarti permasalahan diantara keduanya juga terselesaikan. Sampai saat ini, kedua Korea belum memiliki perjanjian perdamaian sehingga secara tidak langsung kedua Korea masih dalam keadaan berperang.

Akibat tidak adanya perjanjian damai, kedua belah pihak masih terus berupaya untuk menyatukan semenanjung Korea (reunifikasi) dengan ideologinya masing-masing. Pihak Korea Utara menggunakan kekuatan militernya untuk berusaha menyatukan semenanjung Korea dibawah Komunisme sedangkan pihak Korea Selatan yang beraliran demokrasi-kapitalis berusaha untuk melakukan perundingan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan reunifikasi.

Keseriusan Korea Selatan dalam usahanya melakukan reunifikasi dimulai dengan mendirikan Kementerian Unifikasi Korea (*Ministry of Unification*) pada tahun 1 Maret 1969. Hingga pada tahun 1990, proses reunifikasi menunjukkan kemajuan yang menjanjikan.

Proses reunifikasi yang paling signifikan yaitu melalui kebijakan *Sunshine Policy* yaitu pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung. Presiden Kim menginginkan persatuan Korea yang damai melalui dialog aktif dan kerjasama di bidang ekonomi. Untuk kerjasama di bidang ekonomi, Presiden Kim mengajak para *Chaebol* (konglomerat) Korea Selatan untuk membuka usaha bisnis dan dagangnya ke Korea Utara terutama pada bidang infrastruktur.

Kebijakan Kim ini terus menghasilkan hubungan yang baik antar kedua Korea. Pada tahun 2000, Presiden Kim mengunjungi Pyongyang dan bertemu dengan Kim Jong-il untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Kedua pemimpin mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 15 Juni 2000, yang terdiri atas 5 prinsip utama:³

- Upaya mandiri untuk reunifikasi,
- Mencari titik temu bersama terkait pandangan kedua Korea tentang reunifikasi,
- Pertemuan keluarga terpisah, dan penuntasan masalah tawanan perang,
- Pertukaran aktif dan kerjasama, dan
- Pembukaan kembali dialog bilateral antar Korea.

Setelah pemerintahan Kim Dae-Jung berakhir, Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Roh Moo-Hyun. Dibawah kepemimpinan Moo-Hyun, sangat diharapkan untuk lebih memperbaiki hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Harapan itu diperbesar dengan adanya penegasan dari Presiden Roh Moo-Hyun

³ KBS World Radio, "Korut di abad ke-21 – di persimpangan jalan antara 'senjata nuklir' dan 'pembaruan, keterbukaan'", (Diakses pada tanggal 7 Mei 2015), dapat diakses pada laman http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02e.htm

bahwa mengenai masalah hubungan dengan Korea Utara, pemerintahannya akan melaksanakan kebijakan yang didasarkan pada tiga hal pokok, yaitu tetap melanjutkan kebijakan *Sunshine Policy* yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Kim Dae-Jung, pengiriman bantuan ekonomi kepada masyarakat Korea Utara secara berkelanjutan, dan akan menjalankan kebijakan terhadap Korea Utara secara terbuka.⁴ Kebijakan ekonomi dianggap cara yang paling efektif untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara serta membawa Korea Utara ke dalam pergaulan internasional. Dua pemerintahan Korea Selatan dibawah kepemimpinan Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun berhasil untuk melunakkan Korea Utara. Kebijakan yang bersifat soft power ini membawa pada kerjasama-kerjasama di bidang pariwisata yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

Di era pemerintahan presiden setelah Roh Moo-Hyun yaitu Presiden Lee Myung-Bak, hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan kembali mengalami permasalahan. Presiden Lee mengatakan bahwa ia akan mengambil sikap yang lebih kritis terhadap Korea Utara dibanding pemerintahan yang sebelumnya.⁵ Dalam pemerintahannya, Lee Myung Bak menerapkan kebijakan bebas nuklir dan pintu terbuka terhadap Korea Utara yang berdasarkan pada hubungan timbal balik. Latar

⁴ Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas' oed, *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003. hal:122-123

⁵ Tempo.co, *Menuai Kritik, Lee Myung-bak Tetap Melaju*, diakses pada tanggal 07 Mei 2015, dapat diakses melalui laman <http://www.tempo.co/read/news/2011/09/06/118354724/Menuai-Kritik-Lee-Myung-bak-Tetap-Melaju>

belakang ekonomi Lee menjadi alasannya. Pemerintahan Lee mengedepankan perhitungan untung rugi ekonomi terhadap hubungannya dengan Korea Utara.

Pemerintahan Lee melakukan dua pendekatan terhadap rezim pemerintahan Korea Utara terkait reunifikasi. Pertama, Lee menginisiasi adanya “*Denuclearization Open 3.000*,” yaitu jika Korea Utara melakukan program de-nuklirisasi, maka pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara mendapatkan kenaikan pendapatan perkapitanya hingga 3000 US\$. Kedua, Pemerintahan Lee juga akan tetap menggunakan pada *Six Party Talks* sebagai jalan diplomatik untuk memecahkan masalah nuklir KoreaUtara. Akan tetapi *Six Party Talks* gagal menghentikan masalah nuklir Korea Utara hingga akhirnya Korea Utara mendapatkan sanksi dari PBB atas percobaan uji nuklirnya di tahun 2009. Kedua inisiatif Presiden Lee mendapat tanggapan dingin oleh pemerintahan Korea Utara dan menganggap bahwa tawaran Korea Selatan tersebut akan menghancurkan rezim pemerintahan Korea Utara yang telah lama dijalankan dan perjalanan menuju reunifikasi mengalami stagnansi.

Pada pemilu 2013, Korea Selatan memiliki pemimpin baru. 25 Februari 2013, Park Geun-Hye dilantik menjadi presiden ke-11 Republik Korea. Presiden Park merupakan Presiden perempuan pertama Korea Selatan dan selain itu Presiden Park merupakan anak dari Presiden Korea ke-3 Park Chung-Hee yang terkenal sebagai pemimpin yang diktator sekaligus sebagai bapak pembangunan Korea Selatan. Sebagai seorang kepala negara, maka sangat penting bagi Park Geun-Hye untuk melakukan upaya secara maksimal dalam memilih kebijakan politik luar negeri yang

terbaik terhadap Korea Utara agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar serta proses reunifikasi dapat segera terlaksana.

Di masa pemerintahannya, Presiden Park menerapkan kebijakan terhadap Korea Utara berbasis kepercayaan atau *trust* yang kemudian dikemas dalam sebuah kebijakan *Trust Building Process*. Sesungguhnya, konsep kepercayaan ini telah diinisiasi Presiden Park pada tahun 2011 dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada laman *Foreign Affairs* yang berjudul *A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang*. Pemerintahan Presiden Park Geun-Hye telah menetapkan bahwa pada kebijakan *Trust Building Process* berdasar pada fondasi keamanan yang solid, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan antar kedua Korea dan membangun sebuah proses reunifikasi dengan cara yang damai.⁶ Selain itu, terdapat tiga poin utama dalam *Trust Building Process* untuk menjalankan reunifikasi yang damai yaitu pertama, menyelesaikan permasalahan masyarakat Semenanjung Korea melalui cara yang humanitarian, kedua, membangun kembali homogenitas antar masyarakat Semenanjung Korea dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi Semenanjung Korea.⁷

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

⁶ Seongwhun Cheon, *Trust – The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration*, diakses melalui laman http://csis.org/files/publication/130506_Trust_President_Park.pdf, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

⁷ Ministry of Unification, 2015, *Vision for The Unified Korea*, unitv, Seoul, 4:45 menit.

1. Untuk membuktikan isi skripsi dengan rumusan masalah serta membuktikan hipotesa dengan kerangka pemikiran, data serta fakta yang penulis lampirkan.
2. Mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai Kebijakan *Trust Building Process* sebagai pilihan yang digunakan Presiden Park Geun-Hye dalam upaya reunifikasi Semenanjung Korea.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok rumusan masalah yang muncul yaitu **Mengapa Presiden Park Geun-Hye menggunakan kebijakan *Trust Building Process* dalam upaya reunifikasi Semenanjung Korea?**

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, menentukan arah penelitian serta mempermudah penulis untuk menulis hipotesa tentang masalah pokok yang telah dikemukakan, penulis akan menggunakan kerangka dasar pemikiran sebagai berikut:

Personality in Politics

Brad Verhulst, Lindon J. Eaves, dan Peter K.. Hatemi dalam tulisannya yang berjudul *Correlation not Causation: The Relationship between Personality Traits and Political Ideologies* mengatakan bahwa kepribadian politik adalah kepribadian

seseorang memotivasi mereka untuk mengembangkan sikap politik mereka di kemudian hari.⁸ Asumsi ini didasarkan pada korelasi sederhana antara dua konstruksi dan pengamatan bahwa kepribadian secara genetik dipengaruhi dan berkembang di masa anak-anak dan kemudian menjadi preferensi politik di kemudian hari.⁹ Selain faktor genetik, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kepribadian individu.

Kepribadian individu terletak pada apa yang telah individu alami di masa lalu dan sekarang lalu dipengaruhi kondisi psikologis yang selanjutnya tertuang dalam pemikiran dan perilaku politik yang akan dilakukannya dimasa depan. Pengalaman yang dialaminya akan membentuk psikologi kepribadian yang telah lama memegang pandangan bahwa sikap politik adalah bagian dari kepribadian seseorang. Psikologi kepribadian mempertimbangkan nilai-nilai politik bagian dari kepribadian seseorang, dan bukan dari konstruksi independen.

Terkait hal ini, dalam kajian ilmu politik dapat digunakan untuk membahas tentang beberapa sikap politik salah satunya seperti pengaruh latar belakang para pemimpin politik dalam pengambilan kebijakan luar negeri.¹⁰ Psikologi dan kepribadian kepemimpinan mengacu pada hal-hal yang terkait kecenderungan proses psikologis dan asumsi bahwa setiap pemimpin akan membawa dan melibatkannya ke

⁸ Verhulst, Brad, Lindon J. Eaves, dan Peter K.. Hatemi, *Correlation not Causation: The Relationship between Personality Traits and Political Ideologies*, diakses melalui laman <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809096/#>, diakses pada tanggal 15 Mei 2016

⁹ ibid

¹⁰ Huddy, Leony, David O.Sears and Jack Levy (eds), *Introduction: Political Psychology Fundamentals, prepared for Oxford Handbook of Political Psychology*, New York: Oxford University Press, 2013. Hal: 02

dalam keputusan.¹¹ Studi psikologis *decision maker* menambahkan asumsi bahwa para pemimpin membuat keputusan berdasarkan pada objektivitas mereka yang lebih kecil daripada persepsi dan perspektif mereka.¹² Pengambilan keputusan akan dilakukan secara sadar dan rasional yang merujuk kepada pengalaman dan kerangka referensi dari lingkungan sekitarnya sehingga seorang *decision maker* dapat menginterpretasikan semuanya ke dalam sebuah keputusan.

Dengan menggunakan individu Presiden Park Geun-Hye sebagai pengambil keputusan atau kebijakan, tulisan ini juga akan mengungkapkan dan menceritakan bagaimana masa lalu Presiden Park sebagai seorang masyarakat Semenanjung Korea, faktor ayahanda Presiden Park yang merupakan seorang pemimpin Korea Selatan dengan karakteristik otoriter dan dalam lingkungan militer ketika ia kecil, luka mendalam akibat kehilangan kedua orang tua Presiden Park dengan cara yang memprihatinkan serta pengalaman karir berpolitik yang dialaminya sehingga mempengaruhi proses psikologis dan kepribadian Presiden Park Geun-Hye yang menghasilkan pola pikirnya sebagai *decision maker* untuk memilih dan mengembangkan sikap politiknya dengan menggunakan kebijakan *Trust Building Process* sebagai upaya untuk melakukan reunifikasi Semenanjung Korea dengan mengedepankan kebijakan yang damai dan yang bertujuan untuk kebahagiaan untuk masyarakat Semenanjung Korea.

¹¹ Rhenson, Jonathan and Stanley A. Rhenson, *The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making*, Political Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008. Hal:510

¹² Ibid hal 511

Rekonsiliasi

David Whittaker mengungkapkan bahwa rekonsiliasi merupakan proses yang melampaui resolusi yang merujuk bukan hanya untuk pengaturan politik untuk menyelesaikan perbedaan dan tindakan bermusuhan tetapi untuk proses psikologis dimana pemahaman dan toleransi menyebabkan kesiapan untuk hidup bersama dalam kerangka baru. Berikut delapan konflik dipilih dengan kriteria dalam kerangka rekonsiliasi:¹³

- Berasal sebagian besar sebagai perang saudara, mereka hadir ancaman terhadap daerah perdamaian dan keamanan, sering dengan gaung yang lebih luas memberikan mereka sebuah dimensi internasional.
- Mereka menyajikan siklus perselisihan intern, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan perpindahan manusia.
- Mereka sering membangkitkan banding ke mediasi eksternal, penegakan hukum, sanksi dan intervensi.
- Mereka mengajukan pertanyaan sebagai penyebab, kemajuan konflik dan metode menyelesaikan itu.
- Mereka mengangkat isu seberapa jauh setelah resolusi konflik yang berhasil dan mampu membuat hidup yang harmonis dalam masyarakat berdamai.
- Penyajian ini dirancang untuk menjadi faktual tanpa terlalu rinci. Secara keseluruhan, laporan konflik ini diatur dalam cara yang tidak menghakimi.

Rekonsiliasi tidak hanya mempertemukan pihak yang saling berselisih, namun di dalamnya juga ada beberapa unsur. Beberapa unsur itu adalah kebenaran (*truth*), sifat belas kasih manusia (*mercy*), keadilan (*justice*), dan damai (*peace*) dapat bertemu dan bersatu secara bersama,

¹³ Whittaker, J. David, *“Conflict and Reconciliation in The Contemporary World”*, (London: Routledge: 1999) hal: 01

1. Kebenaran (*truth*) yang didalamnya terdapat pengakuan, transparansi, pengungkapan, dan klarifikasi atas suatu kebenaran;
2. Sifat belas kasih (*mercy*) yang mana didalamnya terdapat unsur penerimaan, pengampunan, dukungan, keharusan, dan awal yang baru;
3. Perdamaian (*peace*) dimana didalamnya terdapat unsur harmoni, kesatuan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan, dan yang terakhir adalah adanya syarat-syarat yang mengikat antar kedua belah pihak yang sedang berkonflik.
4. Keadilan (*justice*) yang mana didalamnya terdapat unsur kesetaraan, pemulihan hubungan atas dasar hak-hak yang dimiliki seseorang, memulihkan segala sesuatunya sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya, dan adanya restitusi atau pengembalian hak-hak masing-masing individu.¹⁴

Dari kriterianya diketahui bahwa konflik Semenanjung Korea berasal dari perang saudara yang didalamnya terdapat siklus perselisihan intern, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan perpindahan manusia. Dalam kasus ini, kebijakan *trust building process* yang digunakan oleh Presiden Park mengandung unsur-unsur rekonsiliasi untuk penyelesaiannya. Dari tujuannya, kebijakan ini bertujuan untuk membuka hubungan baru yang damai, melindungi hak-hak masyarakat semenanjung Korea dan internasional yang adil dan damai. Dan implementasi kebijakan ini mengedepankan dialog-dialog, kerjasama, penggunaan kekuatan berimbang antara *soft* dan *hard* power yang tidak memprovokasi munculnya konflik serta pendekatan-pendekatan yang akan memunculkan kepercayaan. Kepercayaan memunculkan pengungkapan, kebenaran atau fakta-fakta sehingga memunculkan solusi yang baik untuk perbaikan hubungan diantara kedua Korea dan kemudian selanjutnya akan menuju arah reunifikasi Semenanjung Korea.

¹⁴ Lederach, John Paul, "Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies", Washington DC: United States Institute of Peace, 1998. hal: 42

E. Hipotesa

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas serta pemaparan kerangka dasar pemikiran, maka penulis dapat menuliskan hipotesis sementara yang dikemukakan dari rumusan masalah.

Kebijakan *Trust Building Process* menjadi pilihan yang digunakan Presiden Park Geun-Hye karena terdapat pengaruh kepribadian yang berasal dari latar belakang dinamika kehidupan pribadi dan karir politiknya di masa lalu untuk membuat hubungan Semenanjung Korea yang semula penuh dengan konflik menjadi sebuah hubungan dengan penuh kepercayaan dan akan menemui puncaknya pada reunifikasi yang mengandung unsur perdamaian, kebenaran, belas kasih, dan keadilan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penulisan, penulis memfokuskan jangkauan penelitian ini pada pembahasan mengenai Kebijakan *Trust Building Process* sebagai pilihan yang digunakan Presiden Park Geun-Hye dalam upaya reunifikasi Semenanjung Korea. Selain itu, penulis juga menuliskan mengenai kebijakan Presiden Korea Selatan sebelum masa kepemimpinan Presiden Park Geun-Hye serta beberapa biografi Presiden Park Geun-Hye. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan, penulis lebih menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah. Secara umum, penelitian ilmiah terdiri dari penyelidikan yang:¹⁵

- mencari jawaban untuk pertanyaan
- sistematis menggunakan satu set standar dari prosedur untuk menjawab pertanyaan
- mengumpulkan bukti
- menghasilkan temuan yang tidak ditentukan di muka
- menghasilkan temuan yang berlaku melampaui batas-batas langsung dari penelitian

Untuk lebih spesifik, penulis menggunakan *Library Research* atau studi kepustakaan untuk menyusun penelitian ini dengan mempelajari buku-buku mengenai studi hubungan Korea Selatan-Korea Utara dan biografis Presiden Park Geun-Hye. Selain buku-buku, penulis juga menggunakan beberapa sumber dari media massa seperti surat kabar, internet, jurnal, majalah, artikel, makalah, isi seminar dan beberapa materi perkuliahan yang telah didapatkan.

Jika dilihat dari rumusan masalah, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

¹⁵ Ccs.neu.edu, "Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide", (diakses pada tanggal 16 Mei 2015), dapat diakses melalui laman <http://www.ccs.neu.edu/course/is4800sp12/resources/qualmethods.pdf>

menggambarkan realita yang tengah terjadi secara sistematis, dan faktual, baik itu situasi, setting sosial maupun hubungan sosial.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Berikut akan di uraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I: Pada bab ini akan di uraikan dan dijelaskan bagian yang menjadi dasar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan pemerintahan presiden Korea Selatan sebelum masa pemerintahan Park Geun-Hye dalam upaya reunifikasi Semenanjung Korea. Kebijakan ini akan dijelaskan sejak masa pemerintahan Korea setelah Perang Korea hingga masa pemerintahan terakhir sebelum Park Geun-Hye menjabat sebagai Presiden Korea Selatan

Bab III: Pada bab ini, akan membahas tentang Presiden Park Geun-Hye sebagai Presiden Korea Selatan. Pada bab ini juga, penulis akan menjelaskan dinamika kehidupan pribadi dan dinamika karir politik Presiden Park Geun-Hye sebagai pengaruh dalam merumuskan kebijakan *Trust Building Process*.

¹⁶ Neuman, J. Vrendenbregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1979, hal:34

Bab IV: Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang kebijakan *Trust Building Process* bahwa pada proses reunifikasi yang tertera menggunakan unsur-unsur rekonsiliasi serta beberapa pencapaian kebijakan *Trust Building Process*.

Bab V: Pada bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan yang telah dikemukakan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.